

## BAB II

### DINAMIKA POLITIK DAN HUBUNGAN IRAN-SURIAH

Iran merupakan salah satu negara yang berada dikawasan Timur Tengah. Dalam catatan sejarah, Iran mempunyai posisi yang strategis bagi negara-negara Barat untuk mendapatkan kepentingannya di Timur Tengah. Pada Abad ke-19, Iran menjadi pusat perhatian antara Inggris dan Rusia. Rusia beranggapan bahwa Iran memiliki peran yang penting demi terjaganya keamanan Rusia di wilayah selatan dan pintu masuk Rusia menuju India. Sebaliknya, Inggris menilai bahwa Iran ada benteng bagi Iran untuk mempertahankan India.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan kepentingannya tersebut, baik Rusia maupun Inggris mencoba mempengaruhi pemerintahan pada saat itu.

Selain posisi Iran yang strategis, Iran juga memiliki cadangan minyak yang melimpah. Pada era Shah Reza Pahlevi, Iran mampu melakukan produksi minyak sampai pada angka enam juta barrel per hari. Melimpahnya sumber daya alam Iran dan letak yang strategis di wilayah teluk Persia, menjadikan Iran sebagai negara yang menjadi objek perebutan pengaruh negara-negara Barat. Situasi dan kondisi ini yang mengakibatkan munculnya Revolusi Islam Iran. Revolusi yang menjadi puncak kemarahan rakyat Iran atas kondisi yang selama ini terjadi. Revolusi tersebut merubah tatanan politik Iran secara fundamental dan merubah haluan politik luar negeri Iran. Perubahan haluan politik Iran ini, menjadikan

---

<sup>1</sup> Roger Garaudy et.al, *Demi Kaum Tertindas; Akar Revolusi Islam Iran*, (Jakarta: Citra, t.th), 71.

semakin eratnya hubungan Iran dengan negara-negara Arab garis keras, terutama Suriah.

#### **A. Revolusi Islam Iran**

Revolusi Islam Iran bukan peristiwa yang muncul begitu saja. Revolusi mempunyai akar sejarah yang cukup panjang dan mencapai klimaks pada tahun 1979. Kemunculan revolusi Islam Iran tahun 1979 mempunyai sebab-sebab dalam kemunculannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan revolusi Islam Iran, yaitu :

*Pertama*, faktor sosial dan budaya, Iran merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Bidang keagamaan mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat Iran. Akan tetapi, pengaruh keagamaan ini semakin terpinggirkan karena upaya modernisasi yang dilakukan oleh Reza Shah (1925-1941) yang dilanjutkan oleh Mohammed Reza Pahlevi (1941-1979). Upaya modernisasi Iran menjadikan hubungan Iran dan Amerika Serikat semakin baik. "Lebih dari 40.000 orang Amerika berada di Iran pada 1978, dan sekitar 60.000 siswa Iran berada di Amerika."<sup>2</sup> Hubungan dekat dengan negara Barat ini berdampak juga pada ekspor kebudayaan yang masuk ke Iran. Kebudayaan tersebut tidak selalu berdampak positif, tetapi kebudayaan tersebut memberikan dampak negatif dan bertentangan dengan nilai kebudayaan masyarakat Iran.

---

<sup>2</sup> Ali M. Ansari, *Supremasi Iran; Poros Setan atau Supremasi Baru?*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2008), 74.

Shah Pahlevi juga berupaya membangkitkan kebudayaan pra Islam. Salah satu usahanya ialah dengan mengubah penanggalan Hijriah (kalender Islam) dengan penganggalan Persia yang mulai diberlakukan pada tahun 1976.<sup>3</sup> Shah juga memperingati ulang tahun ke 2500 berdirinya kerajaan Iran yang dihadiri oleh para pemimpin dari berbagai negara. Upaya Shah Pahlevi tersebut, tidak terlalu disukai rakyat Iran terutama kaum agamawan. Mereka menilai Shah berupaya memisahkan antara politik dan agama.

*Kedua*, faktor politik. Rezim Shah Reza Pahlevi mencoba meminimalisir peran ulama dalam wilayah politik. Berdasarkan UUD 1906, para ulama mempunyai wewenang yang istimewa dalam proses politik. Para ulama yang berada dalam suatu majelis mempunyai wewenang untuk memeriksa dan membatalkan Undang-Undang yang dihasilkan oleh parlemen jika bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>4</sup> Peran strategis ulama tersebut mampu Rezim Shah Pahlevi hapus dan merubah sistem monarki konstitusional menjadi monarki absolut. Shah Reza Pahlevi mampu melemahkan parlemen Iran. Parlemen Iran hanya menjadi pelengkap karena anggota parlemen adalah pendukung Shah Reza.

Dalam menghadapi para lawan politiknya, Shah Reza Pahlevi bersikap represif. Selain mempunyai angkatan militer (darat, udara, laut), Shah Reza Pahlevi juga memiliki pengawal kerajaan (*The Imperial Guard*) dan polisi rahasia (Savak) yang sangat ditakuti oleh rakyat Iran. *The Imperial Guard* merupakan pasukan elit yang bertugas untuk mengawal Shah Reza Pahlevi

---

<sup>3</sup> M. Riza Sihbudi, *Op.Cit*, 29-30.

<sup>4</sup> *Ibid.* 26.

dimanapun dia berada. Sedangkan Savak merupakan polisi rahasia yang dibentuk Shah yang bertugas menindak lawan-lawan politik Shah.<sup>5</sup> Angkatan bersenjata Iran digunakan Shah untuk menjaga kedaulatan negara dan menjaga kekuasaan Shah. Upaya menjaga kekuasaan tersebut tidak jarang dilakukan dengan tindakan represif.

Shah Reza Pahlevi mempunyai ambisi menjadikan Iran sebagai negara diperhitungkan di wilayah teluk Persia. Dalam upayanya tersebut, Shah sangat fokus memperhatikan perkembangan kemajuan di sektor pertahanan dan keamanan. Shah Reza Pahlevi mengalokasikan anggaran yang cukup banyak pada sektor ini. Pada periode 1977 s.d 1978, alokasi anggaran untuk sektor ini mencapai 24% dari total anggaran pada periode tersebut. Sebagai negara yang termasuk anggota CENTO (Central Asia Treaty Organization), suatu pakta pertahanan yang terdiri dari Iran, Turki, Pakistan, dan Inggris. Iran mendapatkan banyak bantuan militer dari Amerika Serikat. Hampir 70% peralatan militer Iran berasal dari Amerika Serikat.<sup>6</sup>

Dalam praktek politik luar negeri, Iran di masa Shah Reza Pahlevi mempunyai hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara Barat pada umumnya. Iran banyak mendapatkan bantuan dari luar negeri baik dari sisi ekonomi, maupun politik dari Amerika Serikat. Selain itu, Iran juga mempunyai hubungan baik dengan Israel. Israel adalah salah satu negara pembeli minyak terbesar Iran dan sangat tergantung dengan supply minyak

*Terakhir*, faktor ekonomi. Rezim Shah menitikberatkan sektor ekonomi pada wilayah industri. Konstruksi mobil, elektronik, dan peralatan rumah tangga adalah sektor industri yang sangat menonjol pada saat itu. Dalam upaya membiayai sektor industri, Shah mengandalkan pemasukan dari produksi minyak. Akan tetapi, besarnya biaya produksi yang dibutuhkan menyebabkan Shah harus mengundang investor asing untuk membiayai sektor industri. Kemajuan pesat di sektor industri meningkatkan pendapatan Iran. Akan tetapi, industri yang dibangun oleh Shah bukanlah industri yang mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya pengangguran, industri hanya mampu menyerap 14,7% pekerja dari seluruh jumlah usia kerja.<sup>7</sup> Meskipun pendapat Iran meningkat tetapi pengangguran warga Iran semakin meningkat.

Selain sektor industri, minyak merupakan wilayah yang menjadi andalan Iran. Pada masa Shah, Iran mampu memproduksi minyak sampai mencapai angka enam juta barrel per hari. Hal ini menempatkan Iran sebagai pengeksport minyak terbesar setelah Arab Saudi. Minyak hasil produksi Iran di ekspor ke berbagai negara seperti, negara-negara Eropa Barat, Jepang, Amerika Serikat, Israel, dan Afrika Selatan. Israel dan Afrika Selatan adalah negara yang sangat bergantung pada minyak Iran. Perang Arab-Israel (1973) yang kemudian diikuti oleh embargo minyak negara-negara Arab terhadap negara-negara yang dianggap mendukung Israel, memberikan keuntungan bagi Iran. Iran menaikkan harga minyak sampai mencapai 300%, sehingga

---

<sup>7</sup> *Ibid.* 19.

pendapatan Iran pada sektor minyak meningkat sangat tajam, dari US \$ 5 milyar menjadi US \$ 19 milyar di tahun 1973, dan US \$ 23,3 milyar pada tahun 1974.<sup>8</sup>

Meskipun Iran mampu meningkatkan pendapatan pada sektor minyak, hal ini juga menimbulkan dampak negatif. Meningkatnya hasil produksi minyak tidak berhasil meningkatkan daya tampung tenaga kerja sehingga pengangguran tetap tinggi. Selain itu, pendapatan dari sektor minyak ini lebih banyak dialokasikan pada sektor industri, sehingga ada ketimpangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi masalah karena hampir 75% dari sekitar 35 juta penduduk Iran bergantung pada sektor pertanian.<sup>9</sup> Upaya reformasi agraria yang dilakukan Shah pada tahun 1963 tidak mampu berjalan maksimal. Tanah-tanah yang dibebaskan dari tuan tanah, hanya menjadi milik pemerintah dan tidak mampu merubah nasib para petani.

Kebijakan Shah pada wilayah ekonomi, politik, dan sosial budaya menimbulkan kekecewaan bagi rakyat Iran. Upaya Shah mengurangi tingkat partisipasi politik rakyat Iran menimbulkan kekecewaan dari kalangan nasionalis, agamawan, dan kelompok yang lainnya. Upaya industrialisasi menimbulkan kesenjangan yang cukup mendasar antara si kaya dan si miskin, meningkatkan tingkat pengangguran. De-Islamisasi yang dilakukan Shah semakin menguatkan kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Shah

Demonstrasi yang terjadi di kota Qum yang dilakukan oleh para pelajar dan mahasiswa Qum pada tanggal 9 Januari 1978 adalah awal pergolakan dan demonstrasi yang berhasil menggulingkan Shah Reza Pahlevi. Demonstrasi yang dilakukan sebagai bentuk penentangan para pelajar dan mahasiswa atas pernyataan Menteri Penerangan-Darius Hamayan- yang menghina Imam Khomeini, terus meluas dan menjadi demonstrasi atas ketidakpuasan rakyat terhadap Shah. Para penentang Shah terus melakukan perlawanan terhadap Shah. Tidak kurang pergolakan dan demonstrasi terjadi dalam kurun waktu satu tahun dan tidak lebih dari empat perdana menteri silih berganti dalam kurun waktu tersebut. “Mereka adalah Jamshid Amuzegar, Jafar Sharif Emami, Jenderal Gholam Reza Azhari, dan terakhir Shahpour Bakhtiar.”<sup>10</sup> Kembalinya Imam Khomeini pada tanggal 01 Februari 1979, sikap netral pihak militer dan kepergian Shah ke luar negeri pada tanggal 11 Februari 1979, menandakan tergulingnya kekuasaan Shah Reza Pahlevi dan kemenangan Revolusi Islam Iran.

Dalam pandangan Imam Khomeini, suatu keharusan bagi setiap Muslim untuk menghancurkan pemerintahan yang rusak dan juga merusak serta pemerintahan yang penuh dengan pengkhianatan, kerusakan, dan kezaliman.<sup>11</sup> Berdasarkan hal ini, revolusi Islam adalah suatu upaya untuk menumbangkan pemerintahan yang zalim dan membentuk negara dan sistem pemerintah Islam.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* 31.

## **B. Dinamika Politik Iran Pasca Revolusi**

### **1. Kepemimpinan Imam Khomeini**

Kemenangan Revolusi Islam Iran yang berhasil menumbangkan rezim Reza Pahlevi merubah tatanan politik yang ada selama ini. Segera setelah kemenangan revolusi, Imam Khomeini merubah Iran menjadi negara Republik. Sang Imam merubah sistem monarki yang selama ini digunakan negara Iran. Selain itu, Khomeini menjadikan Iran sebagai negara yang berbasis keagamaan. Dalam sistem politik ini, tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Konsep ini dirumuskan Imam Khomeini dalam sistem politiknya, yang dikenal dengan Wilayahul Faqih.

Wilayahul Faqih merupakan konsep hasil pemikiran Imam Khomeini. Dalam konsep Wilayahul Faqih sangat kental terasa pengaruh mazhab syi'ah. Meskipun jika kita melihat sejarah Islam khususnya syi'ah, kita tidak akan menemukan sistem pemerintahan dengan menggunakan Wilayahul Faqih. Konsep Wilayahul Faqih adalah konsep yang sebenarnya asing bagi kaum syi'ah sendiri. Dia adalah konsep yang merupakan hasil karya Imam Khomeini atas dasar pemahaman tentang mazhab syi'ah yang Khomeini yakini. Diberlakukannya sistem pemerintahan Wilayahul Faqih, mengindikasikan kuatnya pengaruh syi'ah dalam sistem politik Iran pasca revolusi.

Syi'ah adalah mazhab terbesar kedua setelah sunni dalam agama Islam. Jumlah pemeluk syi'ah sekitar 130 s.d 195 juta orang atau



sepuluh sampai sekitar lima belas persen dari total jumlah umat Islam.<sup>12</sup> Sekitar 90% rakyat Iran adalah penganut mazhab syi'ah.<sup>13</sup> Muhammad Jawad Maghniyah, seorang ulama syiah mendefinisikan syi'ah sebagai "kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad saw telah menetapkan *nash* (pernyataan yang pasti) tentang khalifah (pengganti) beliau dengan menunjuk Imam Ali kw."<sup>14</sup>

Perbedaan mendasar mazhab syi'ah dan sunni adalah masalah kepemimpinan (*Imamah*). Syi'ah meyakini bahwa kepemimpinan pasca Nabi Muhammad telah ditentukan dengan menunjuk Imam Ali, sedangkan kaum sunni meyakini bahwa Nabi Muhammad tidak menunjuk dengan jelas siapa pemimpin pasca Nabi. Menurut kaum sunni pengganti nabi tidak perlu pengecualian akan kualitas beragama yang khusus tetapi cukup seorang muslim yang baik, bisa menjadi contoh menyangkut urusan keagamaan dan urusan politik kelompoknya. Kaum sunni memilih Abu Bakar, sahabat sekaligus mertua Nabi Muhammad sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad saw.

Dalam keyakinan mazhab syi'ah, kepemimpinan pasca Nabi Muhammad saw telah beliau tentukan dengan menunjuk Imam Ali. Selanjutnya Imam Ali menunjuk penggantinya sendiri, dan Imam-Imam selanjutnya melakukan hal yang sama.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Vali Nasr, *Kebangkitan Syi'ah; Islam, Konflik, dan Masa Depan*, (Jakarta: Diwan, 2007), 31.

<sup>13</sup> *Ibid.* 254.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergantengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 61.

<sup>15</sup> Allamah Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Inilah Islam; Pemahaman Dasar Konsep-Konsep Islam*, ( Jakarta: Sadra Press, 2011), 138.

Selain perbedaannya dengan sunni, syi'ah juga terpecah kedalam beberapa aliran yang berbeda satu sama lain, meskipun tetap mengakui Ali sebagai Imam mereka. Aliran syi'ah tersebut adalah *Itsna 'Asy'ariyah* (dua belas imam), *Zaidiyah*, *Isma'illiyah* (tujuh Imam). Mayoritas penduduk Iran adalah penganut syi'ah yang beraliran *Itsna 'Asy'ariyah* atau Imam dua belas. Aliran ini berkeyakinan bahwa, pasca Nabi Muhammad saw, kepemimpinan dilanjutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan dilanjutkan oleh para keturunannya yang kesemuanya berjumlah dua belas orang. Rasulullah, Fatimah dan kedua belas Imam dikenal dengan sebutan empat belas manusia suci (maksud). Mereka adalah orang-orang terpilih yang disucikan dari dosa. Kedua belas Imam tersebut ialah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan bin Ali, Imam Husein bin Ali, Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Al-Shadiq, Imam Musa Al-Kazhim, Imam Ridha, Imam Muhammad Taqi, Imam Ali An-Naqi, Imam Hasan Al-Askari, dan Imam Muhammad bin Al-Hasan.<sup>16</sup>

Imam Muhammad bin Al-Hasan merupakan Imam terakhir yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Mahdi. Dalam keyakinan Syi'ah Imam Dua Belas, Imam Mahdi menjalani kegaiban besar sampai suatu waktu, Imam Mahdi akan kembali muncul untuk memenuhi dunia dengan keadilan. Selama masa kegaiban besar ini, Imamah dipercayakan kepada

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 145.

para ulama yang mempunyai kemampuan dalam penguasaan dalam bidang agama dan hukum Islam.

Imamah merupakan hal yang sangat penting dalam mazhab syi'ah. Setiap penganut syi'ah wajib meyakini Imamah. Imamah adalah hal yang sangat fundamental dan menjadi pembeda antara syi'ah dan sunni.

Sebagai seorang ulama yang berpegang teguh pada keyakinannya, Imam Khomeini berupaya membangun Iran pasca revolusi dengan nilai-nilai Islam yang dia yakini. Bagi Imam Khomeini, membentuk pemerintahan Islam adalah suatu keharusan. Berdasarkan keyakinannya pada mazhab syi'ah, Khomeini merumuskan Wilayatul Faqih. Sistem pemerintahan yang mengantarkan para ulama (mullah) pada puncak kekuasaan. Gagasan tersebut sudah sang Imam kemukakan dengan konsisten. Gagasan tersebut antara lain :<sup>17</sup>

- a. Para alim-ulama yang berhak menjadi penguasa dalam sebuah negara Islam adalah lelaki yang memiliki kecerdasan dan kepandaiaan yang luas sehingga mampu mengerahkan potensi masyarakat.
- b. Seorang fuqaha berfungsi sebagai pewaris nabi, oleh karenanya mempunyai tugas dan kewajiban untuk mempergunakan aparat bersenjata dan aparat politik, demi pelaksanaan hukum-hukum Tuhan, serta membentuk suatu sistem pemerintahan demi kemakmuran bangsa.
- c. Membentuk pemerintahan atau negara Islam, hukumnya wajib bagi umat Islam, khususnya alim-ulama dimanapun mereka berada, karena hal itu merupakan bagian dari akidah Immamiyah.
- d. Negara atau pemerintahan Islam diperlukan demi tegaknya hukum-hukum Islam, karena hukum apapun tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya suatu kekuasaan eksekutif.
- e. Di dalam negara Islam, para wakil rakyat tidak berhak membuat undang-undang, karena undang-undang atau dasar hukum (Islam) diperoleh langsung dari Tuhan, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>17</sup> M. Riza Sihbudi, *Op.Cit.* 62.

Kepemimpinan Ulama merupakan perubahan tatanan politik yang sangat mendasar pasca kemenangan Revolusi Islam. Iran dibawah kepemimpinan Imam Khomeini adalah negara yang sangat ideologis, pemerintahan Islam yang berpegang teguh pada keyakinan mazhab Syi'ah *Itsna 'Asy'ariyah*.

Imam Khomeini dan para pengikutnya berhasil membangun sistem politik yang sesuai dengan gagasan-gagasannya. Para ulama banyak menempati posisi strategis baik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif merupakan pelaksana hukum syari'ah yang sesuai dengan yang ditafsirkan oleh pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi adalah institusi politik yang paling dominan dan tidak mempunyai tandingan dalam sistem politik Iran.

Pemimpin tertinggi mempunyai tempat yang sangat istimewa karena tidak ada institusi lain yang sebanding dengannya bahkan konstitusi sekalipun. Pasca revolusi, pemimpin tertinggi Iran dijabat oleh Imam Khomeini. Wewenang Imam Khomeini sangat besar dalam sistem politik Iran. Iran juga memiliki institusi yang dinamakan Dewan Pengawal. Dewan Pengawal adalah "Dewan yang terdiri dari 6 mullah dan 6 ahli hukum yang kesemuanya diangkat oleh pemimpin tertinggi adalah institusi politik yang mengawasi proses legislasi di Majelis."<sup>18</sup> Dewan Pengawal mempunyai wewenang untuk membatalkan produk undang-

---

<sup>18</sup> Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran; Puritanisme Agama, Proses Demokratisasi, dan*

undang yang dirumuskan oleh Majelis jika bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Selain keberhasilannya membangun sistem politik yang sangat kental dengan pengaruh mazhab Syi'ah. Imam Khomeini juga membangun haluan politik Iran yang sangat anti imperialisme. Iran di masa Khomeini membangun landasan politik luar negerinya kedalam 7 prinsip.<sup>19</sup> *Pertama*, menolak segala bentuk dominasi. *Kedua*, mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan wilayah. *Ketiga*, mempertahankan hak-hak umat Islam. *Keempat*, nonblok seperti dalam slogannya *Laa Syarqiyyah Laa Gharbiyyah* (tidak Timur tidak Barat). *Kelima*, berdamai dengan negara-negara yang tidak agresif. *Keenam*, menganggap kemerdekaan, kebebasan, dan keadilan sebagai hak-hak universal. *Terakhir*, menyokong setiap perjuangan kaum *mustad'afin* tetapi menahan diri dari segala bentuk intervensi.

Menurut Khomeini, "Islam adalah agama bagi orang-orang yang berjuang melawan imperialisme, dan menyerah pada penindasan lebih tidak bermoral daripada penindasan itu sendiri."<sup>20</sup> bagi khomeini dunia dibagi dalam dua kategori, penindas (*mustakbirin*) dan yang ditindas (*mustad'afin*). Iran pasca revolusi berusaha menampilkan dirinya sebagai negara yang membela kaum *mustad'afin* dan selalu menentang negara-

Khomeini menilai dunia dikuasai oleh kekuatan besar yang menindas, kedua kekuatan itu adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Berdasarkan realitas tersebut, Imam Khomeini mencoba membangun politiknya yang tidak mendukung dua kekuatan besar tersebut. Sikap politik yang dikenal dengan slogannya *Laa Syarqiyyah Laa Gharbiyyah* (tidak Timur tidak Barat). Iran menolak setiap tindakan imperialisme. Iran dengan tegas menolak keberadaan Israel. Pasca kemenangan revolusi Islam, Iran dengan segera menghentikan ekspor minyak ke Israel dan menutup kedutaan Israel dan menggantinya dengan PLO.

Iran juga mencoba mengeksport revolusi ke berbagai negara-negara di dunia Islam. Imam Khomeini yakin bahwa untuk melakukan ekspor revolusi Islam Iran harus dilakukan dengan cara-cara yang damai. Oleh karena itu pasca revolusi, Kementrian Bimbingan Islam melembagakan suatu program untuk menyebarkan pesan Iran dengan cara mensponsori kunjungan ulama-ulama Islam ke Iran, memberikan beasiswa kepada kalangan muda untuk belajar di lembaga-lembaga keagamaan Iran, dan melakukan cara lainnya yang bersifatnya damai.

Upaya Imam Khomeini membangun sistem politik Iran menimbulkan ketidakpuasan terhadap pondasi ideologis Republik Islam Iran. Wilayatul el Faqih sebagai hasil pemikiran politik Imam Khomeini tidak pernah mendapat dukungan penuh dari para ulama sendiri. Sebagian ulama tersebut menilai bahwa konsep tersebut tidak pernah dikenal dalam sejarah Syiah karena selama perjalanan sejarah Syiah

tidak pernah muncul sistem pemerintahan seperti yang dicetuskan Imam Khomeini.

Ketidakpuasan terhadap sistem Wilayatul Faqih muncul dari ulama sepuh Ayatullah Kazem Sahri'atmadari. Beliau menekankan pentingnya peran rakyat dalam demokrasi Islam serta menentang kekuasaan para mullah yang tanpa batas.<sup>21</sup> Dorongan untuk melakukan koreksi terhadap sistem yang ada tidak hanya berhenti sampai disini. Ayatullah Montarezi sebagai salah satu Ayatullah yang juga murid dari Imam Khomeini turut melakukan koreksi terhadap pemerintahan yang tengah berjalan. Sebagai seorang murid yang setia terhadap gurunya, Montarezi memilih bersebarangan dengan gurunya dalam melihat realitas politik yang ada. Montarezi menilai bahwa rezim terlalu banyak campur tangan terhadap urusan masyarakat dan bertindak represif terhadap kelompok yang dinilai sebagai musuh Islam.

## **2. Pasca Imam Khomeini; Kepemimpinan Rafsanjani**

Upaya untuk merubah haluan politik Iran baik dalam maupun luar negeri mendapatkan momentum pasca wafatnya Imam Khomeini dan terpilihnya Ali Akbar Hashemi Rafsanjani sebagai presiden Iran. Pemerintahan Rafsanjani berhasil menekan angka kekerasan politik yang terjadi pada dekade 80-an sebagai akibat dari pembersihan kelompok kiri. Iran dimasa Rafsanjani dihadapkan dengan kondisi ekonomi, sosial, pasca perang Iran-Irak yang sangat memprihatinkan. Rafsanjani

---

<sup>21</sup> Bambang Cipto, *Op.Cit*, 3.

melakukan terobosan dengan mencanangkan program pembangunan ekonomi sebagai poros utama kebijakan dalam negerinya.<sup>22</sup> Atas usaha membangun perekonomian Iran, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani sering disebut bapak pembangunan (*sardar-re sazandeghi*).

Rafsanjani memberikan cara pandang baru dalam melihat revolusi. Kondisi masyarakat Iran pasca perang Iran-Irak menjadikan pemerintah harus mampu memenuhi kesejahteraan rakyat. Rafsanjani memilih melakukan pembangunan ekonomi. Upaya yang bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah selama masa Imam Khomeini yang lebih menekankan sisi revolusioner. Rafsanjani membangun pemerintahannya dengan sikap yang lebih moderat.

Sebagai bentuk upayanya untuk membangun kembali ekonomi Iran, Rafsanjani mencoba mengembangkan sistem ekonomi pasar. Negara akan lebih berperan sebagai pengawas dan tidak lagi mengatur perekonomian karena sistem ini menuntut pengurangan peran negar dalam hal ekonomi. Rafsanjani juga mencoba membuka pintu bagi investor seluas-luasnya untuk berinventasi.

Program ekonomi yang dilakukan Rafsanjani menimbulkan pro dan kontra. Hojjatolislam Karubi, seorang tokoh radikal menyebutkan bahwa kebijakan ekonomi Rafsanjani sebagai kebijakan ekonomi liberal dan bahkan menuduh Islam yang diyakini Rafsanjani tidak lebih dari



Islam Amerika.<sup>23</sup> Beberapa kalangan juga menilai bahwa pembangunan ekonomi bukan prioritas utama Iran pada saat itu, yang lebih penting bagi Iran ialah pembangunan politik, sosial, dan budaya. Mereka menentang kebijakan Rafsanjani karena dinilai menjauhkan Iran dari cita-cita revolusi. Kelompok radikal ini juga menentang investasi asing, hutang luar negeri, dan menuduh Rafsanjani sebagai pelayan kaum *mustakbirin*.

Sikap moderat yang diusung presiden Rafsanjani juga tercermin dalam kebijakan luar negerinya. Bagi Rafsanjani, tidak mungkin bagi Iran untuk hidup menyendiri dari pergaulan internasional. Oleh karena itu, Rafsanjani mencoba membangun kembali hubungan dengan negara-negara Arab dan Barat. Upaya membangun kembali hubungan dengan negara Arab terlihat dari sikap moderat Rafsanjani dalam menyikapi krisis teluk yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya melawan Irak yang menduduki Kuwait.<sup>24</sup> Upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang maksimal akibat mengalami tentangan dari kubu konservatif.

Selain upaya membangun hubungan kembali dengan negara-negara Arab, Iran di masa Rafsanjani juga mencoba membangun kembali hubungan dengan negara Eropa dan Amerika Serikat. Rafsanjani pernah mengatakan bahwa "Pada prinsipnya Iran tidak berkeberatan membangun hubungan dengan semua negara asalkan berdasarkan prinsip yang benar."<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid.* 28.

<sup>24</sup> *Ibid.* 90.

<sup>25</sup> *Ibid.* 91.

Meskipun Iran dibawah kepemimpinan Rafsanjani mencoba memunculkan sikapnya yang lebih moderat dalam kebijakan luar negeri, tetapi Rafsanjani tetap dengan tegas menolak keberadaan Israel. Rafsanjani mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya.

### **3. Kepemimpinan Khatami**

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani merupakan pelopor sikap politik Iran yang moderat pasca Revolusi Islam Iran. Landasan sikap moderat yang sudah dibangun oleh Rafsanjani akan coba diteruskan oleh penerusnya yaitu Mohammad Khatami. Jika Hashemi Rafsanjani mencoba membangun ekonomi yang hancur akibat perang sebagai tujuan utama, maka Khatami lebih menekankan perjuangan membangun demokrasi Iran.

Khatami adalah presiden Iran yang menggantikan Ali Akbar Hashemi Rafsanjani pada pemilu 1997. Sebagai seorang mantan Direktur Pusat Studi Islam di Hamburg, Jerman, Khatami memiliki pandangan yang sangat moderat. Di masa awal revolusi Khatami mendapatkan tugas sebagai editor berita harian *Kayhan* atas perintah Imam Khomeini. Pada tahun 1983, Khatami diangkat menjadi Menteri Kebudayaan dan Pembinaan Islam. Di bawah Khatami lah perfilman Iran mampu berkembang dengan pesat. Selain karena subsidi yang diberikan pemerintah, Khatami membuka impor film seluas-luasnya. Walaupun jabatannya tetap bertahan sampai kepemimpinan Rafsanjani tetapi

Khatami akhirnya harus lengser dari jabatannya sebagai akibat dari pemikiran-pemikirannya yang dicap liberal oleh kaum konservatif.

Pemilu pada tahun 1997, mengantarkan Khatami pada tampuk presiden Iran. Kemenangan Khatami dalam pemilu 1997, tidak terlepas dari kemampuan Khatami melihat realitas politik yang ada. Sebagai negara yang sedang berkembang, Iran juga menghadapi masalah-masalah seperti korupsi, kondisi ekonomi yang buruk, pengangguran serta ketidakpuasan terhadap penguasa. Situasi Iran pada tahun 90-an adalah berkembangnya kalangan muda yang semakin terdidik. Situasi ini mampu dimanfaatkan Khatami dengan baik. Sikap moderatnya menjadikan Khatami banyak didukung oleh kalangan muda juga perempuan.

Selama kepemimpinannya (1997-2005), Khatami berupaya membangun sistem politik yang demokratis. Khatami membangun kabinetnya dengan basis kaum reformis. Khatami meyakini bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. dalam upayanya membangun demokrasi, pemerintahan Khatami mencoba mendorong perluasan media massa, peningkatan peran wanita di berbagai bidang, dan mendorong dialog publik untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>26</sup>

Khatami mendorong tumbuh kembangnya dialog. Dialog-dialog seputar, toleransi, tertib hukum, dan dampak negatif kekerasan dalam membangun kehidupan politik. Bagi Khatami tidak mungkin tujuan

tujuan politik dapat terwujud dengan baik jika dibingkai dengan cara-cara kekerasan. Selain upayanya membangun dialog publik, Khatami juga mendorong perluasan media massa. Media massa sebagai sarana komunikasi publik dan media pendidikan berkembang semakin luas semenjak Khatami menjadi presiden. Debat publik semakin sering muncul di media-media massa.

Pencapaian yang sangat menarik dalam upaya demokrasi yang dilakukan Khatami adalah pemilihan tingkat daerah yang mampu direalisasikannya. Pemilihan tingkat daerah ini adalah pemilihan tingkat daerah pertama pasca revolusi. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat baik dalam upaya demokrasi yang dikampanyekan Khatami.

Dalam membangun kebijakan luar negeri, Khatami melanjutkan orientasi politik luar negeri yang dibangun oleh Rafsanjani. Politik luar negeri Khatami lebih cenderung realistis, tidak terlalu ideologis. Khatami meneruskan upaya menjalin hubungan dengan negara-negara Arab. Usaha ini berhasil dengan diselenggarakannya Konferensi OKI pada tahun 1997 di Teheran. Hal ini menandakan penerimaan negara-negara Arab terhadap Iran. Hubungan Arab-Iran selama ini penuh kecurigaan karena upaya ideologis Iran untuk mengeksport revolusi. Khatami juga mampu membangun hubungan kembali dengan negara-negara Eropa. Terjalannya hubungan ini meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara

Khatami juga berupaya membangun hubungan dengan Amerika, meskipun usaha tersebut mendapat tentangan sangat keras dari kelompok konservatif. Khatami mengusulkan sebuah dialog peradaban, meskipun ditolak oleh pemerintahan Amerika Serikat.<sup>27</sup> Meskipun Khatami mencoba membangun hubungan dengan negara-negara Arab maupun Barat, tetapi Iran di masa Khatami tetap menolak keberadaan Israel. Iran di masa Khatami bahkan menentang Turki yang membangun hubungan baik dengan Israel dan Amerika Serikat.<sup>28</sup>

### C. Dinamika Hubungan Iran-Suriah

Suriah adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang mempunyai luas wilayah 185.180km. Secara geografis, Suriah merupakan negara yang berbatasan dengan Turki di sebelah utara, Irak disebelah timur, Yordania disebelah selatan, dan Libanon, Laut Tengah, Israel di sebelah barat.<sup>29</sup> Suriah merupakan negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang. Berdasarkan catatan sejarah, wilayah Suriah kuno meliputi Yordania, Israel, Lebanon, dan Suriah modern. Karena letaknya yang strategis menjadikan Suriah sebagai wilayah yang selalu diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar sepanjang sejarah. Tercatat bahwa kekaisaran-kekaisaran besar seperti Romawi, Persia, maupun Mesir pernah menguasai Suriah. Pada tahun 635,

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 96.

<sup>28</sup> *Ibid.* 95.

<sup>29</sup> *Kebijakan Luar Negeri dan Perkembangan Ekonomi Suriah*, (diakses 10 Juli 2012); diperoleh dari <http://www.deplu.go.id/layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=..&ItemID=e7162b0e-04cb-48de-bb1f-cec93f34ab36>

kaum Muslim berhasil merebut Suriah dari kekaisaran Bizantium.<sup>30</sup> Perebutan wilayah Suriah terus berlangsung hingga kekaisaran Ottoman Turki. Pasca kekalahan Ottoman, Suriah diserahkan kepada Prancis.

Suriah berhasil keluar dari kolonialisme dan menjadi negara yang merdeka pada tanggal 17 April 1946. Pasca kemerdekaan, Suriah mengalami instabilitas politik yang cukup panjang. Sehingga pada November 1970, Menteri Pertahanan Suriah, Jenderal Hafeez Al-Assad mengambil alih kekuasaan Suriah dan menjadi Presiden Suriah sejak tahun 1971. Keberhasilan Hafeez Al-Assad mengambil alih kekuasaan tidak terlepas dari dukungan Partai Baath terhadap dirinya.

Suriah dikenal sebagai negara Arab yang memiliki pandangan cukup keras. Pandangan keras Suriah terlihat dengan sikapnya yang sering tidak sejalan dengan Amerika Serikat dan menentang keberadaan Israel. Penentangan terhadap Israel tidak terlepas dari pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel terhadap wilayah Golan yang dimiliki Suriah.

Pada saat terjadi perang Iran-Irak, Iran sedang mengalami transisi pasca Revolusi. Sengketa perbatasan mewarnai hubungan kedua negara, yang selanjutnya ketegangan tersebut berlanjut menjadi konflik terbuka. Saddam Hussein, Presiden Irak membatalkan secara sepihak perjanjian Algier pada tanggal 20 September 1980. Perjanjian Algier adalah perjanjian yang dilakukan oleh Iran dan Irak di Algier, Aljazair pada tahun 1975. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menentukan batas perairan kedua negara dan upaya

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

kerjasama keamanan dalam upaya menjaga perbatasan kedua negara.<sup>31</sup> Perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak oleh Saddam Hussein dan disusul dengan invasi pasukan Irak ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980.

Perang Iran-Irak tersebut mengawali hubungan baik Iran dan Suriah. Semenjak meletusnya perang Iran-Irak, Suriah bersama Libya adalah negara yang dengan tegas mendukung Iran. Hal ini berbeda dengan sebagian besar negara Arab yang mendukung Irak. Selama berlangsungnya perang Iran-Irak, Suriah dan Libya terus memberikan bantuan dengan memberikan peralatan-peralatan militer kepada Iran untuk menghadapi Iraq. Bantuan yang diberikan Suriah dan Libya, dibalas Iran dengan melakukan pengiriman minyak dan komoditi lainnya kepada Suriah dan Libya dengan harga yang lebih murah.<sup>32</sup>

Hubungan kedua negara tidak hanya berakhir pada dukungan Suriah terhadap Iran di saat perang Iran-Irak. Kesamaan pandangan dalam menyikapi berbagai masalah juga melandasi keberlangsungan hubungan kedua negara. Kesamaan pandangan tersebut tercermin dari sikap kedua negara yang memberikan simpati dan dukungannya kepada milisi Syi'ah dan Druz di Lebanon.<sup>33</sup> Iran, Suriah bersama Libya, Aljazair, dan Yaman Selatan membentuk aliansi radikal. Akibat dari sikapnya yang radikal tersebut, Iran, Suriah, dan Libya sering dicap sebagai negara-negara yang mendukung terorisme internasional.

---

<sup>31</sup> M. Riza Sihbudi, *Op.Cit*, 99.

<sup>32</sup> *Ibid.* 103.

<sup>33</sup> *Ibid.* 104.

Dalam dinamikanya, hubungan Iran dan Suriah sempat mengalami fase-fase yang kurang harmonis. Sejak pecahnya perang teluk, Suriah menjadi pendukung utama Iran. Kondisi tersebut membuat hubungan Suriah dengan Irak semakin memburuk. Tetapi hubungan tersebut agak sedikit membaik pasca terjadinya perubahan orientasi Presiden Hafez Al-Assad. Hal ini terjadi terutama sejak terjadinya normalisasi hubungan Suriah dan Yordania. Raja Hussein dari Yordania menginginkan normalisasi hubungan Hafeez dan Saddam.<sup>34</sup>

Hubungan Iran dan Suriah menjadi kurang harmonis karena Iran cukup kecewa terhadap Suriah yang belum melunasi pembelian minyak Iran. Sedangkan Suriah khawatir akan kemajuan Iran dalam perkembangan Perang Iran-Irak. Pasukan Iran yang berhasil menerobos masuk ke semenanjung Al Faw, Irak Selatan dinilai Suriah akan mengancam keamanan teritori Arab. Meskipun hubungan kedua negara sempat merenggang dalam dinamika perang Iran-Irak, tetapi hubungan kedua negara bisa kembali berjalan dengan relatif cukup baik. Pasca perang Iran-Irak, aliansi Iran, Suriah, dan Libya tetap dikategorikan sebagai kelompok radikal.

Pecahnya perang teluk yang melibatkan Irak-Kuwait juga tidak mempengaruhi pengaruh hubungan Iran dan Suriah secara signifikan. Iran yang memilih bersikap netral dalam perang teluk, sangat menguntungkan posisi Iran. Perang teluk merupakan perang yang mempengaruhi konstelasi politik negara Timur Tengah, karena melibatkan hampir semua negara Arab

---

<sup>34</sup> *Ibid.* 151-152.



yang lain. Sikap Netral Iran dalam perang teluk membuat Iran bisa lebih fokus dalam membangun kembali kondisi dalam negari Iran.

Wafatnya Presiden Suriah, Hafeez Al Assad pada tahun 2000, tidak banyak merubah hubungan kedua negara. Bashar Al Assad sebagai penerus tampuk kepemimpinan Suriah tetap menjalankan kerjasama dengan Iran. Suriah di bawah kepemimpinan Bashar Al Assad dan Iran dibawah kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad tetap menjalankan kerjasama diantara kedua negara. Kerjasama kedua negara telah menjalar ke berbagai sektor. Kerjasama kedua negara baik diwilayah politik maupun ekonomi terus berlanjut. Kedekatan kedua negara digambarkan oleh Menteri Luar Negeri, Walid Moallem Suriah sebagai hubungan yang strategis alami. Walid mengatakan bahwa hubungan kedua negara dalam bidang perdagangan telah mencapai multi miliaran dollar dan akan membuat musuh Iran dan Suriah tidak senang.<sup>35</sup> Pada kesempatan yang lain, Presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad mengatakan bahwa dia tidak melihat ada batasan untuk terus mengembangkan hubungan bilateral kedua negara, dan perluasan hubungan tersebut akan sangat bermanfaat bagi terciptanya perdamaian serta keamanan regional dan global.<sup>36</sup>

Hubungan baik kedua negara melahirkan banyak kerjasama diberbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Di Tahun 2010 misalnya, kedua

---

<sup>35</sup> *Hubungan Iran- Suriah Strategis Alami*, (diakses 10 Juli 2012); diperoleh dari <http://beritasore.com/2010/11/15/hubungan-iran-suriah-strategis-alami/>

<sup>36</sup> *Iran: Tak Ada Batasan Hubungan Bilateral Iran-Suriah*, (diakses 10 Juli 2012); diperoleh dari <http://international.okezone.com/read/2012/03/28/412/600937/iran-tak-ada-batasan-hubungan-bilateral-iran-suriah>

negara bersepakat untuk melakukan perdagangan bebas. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Mehdi Ghanzafari, Menteri Perdagangan Iran dan Lamia Asi, Menteri Ekonomi dan Perdagangan Suriah. Selain melakukan kerjasama perdagangan bebas, kedua negara juga melakukan perundingan soal ekspor listrik dan gas ke Suriah, dan peningkatan kerjasama transportasi.<sup>37</sup> Iran dan Suriah serta Irak juga menjalin kerjasama pipa gas Alam. Ketiga negara bersepakat mengenai pembangunan pipa gas alam yang dibangun Iran yang melewati Irak dan Suriah menuju Eropa.<sup>38</sup> Kerjasama ekonomi kedua negara tetap berjalan dengan baik, meskipun Suriah dalam kondisi krisis politik. Adnan Salahu, Menteri Perindustrian Suriah mengatakan bahwa “Kerjasama berbagai bidang, terutama ekonomi dan perdagangan antara Suriah dan Iran terus meningkat.”<sup>39</sup> Pendanaan Iran dalam proyek-proyek industri dan perdagangan di Suriah cukup besar.

---

<sup>37</sup> *Iran-Suriah Teken Nota Kesepakatan Pedagangan Bebas*, (diakses 18 Juni 2012); diperoleh dari [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=2758&type=6](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=2758&type=6)

<sup>38</sup> *Iran, Irak, dan Suriah Teken Perjanjian Pipa Gas Alam*, (diakses 01 Juli 2012); diperoleh dari [http://www.analisadaily.com/news/read/2011/07/27/5876/iran\\_irak\\_dan\\_suriah\\_teken\\_perjanjian\\_pipa\\_gas\\_alam/](http://www.analisadaily.com/news/read/2011/07/27/5876/iran_irak_dan_suriah_teken_perjanjian_pipa_gas_alam/)

<sup>39</sup> *120 Perusahaan Iran Berpameran di Suriah*, (diakses 10 Juli 2012); diperoleh dari <http://www.antaraneews.com/berita/1305049509/120-perusahaan-iran-berpameran-di-suriah>